



ISSN : 0216-9517

MAJALAH ILMIAH KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

mimbar studi

DEPARTEMEN AGAMA R.I.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI



Majalah Ilmiah

mimbar studi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Nurrohmah

MAJALAH ILMIAH BIDANG KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

KETUA PENGARAH

REKTOR IAIN "SGD" BANDUNG
Prof. DR. H. Rachmat Djatnika

STAF PENGARAH

Drs. H. Endang Soetari, Ad.
Drs. E. Usman Effendi, MS.
Drs. H. Ahmad Subandi
Drs. H. O. Taufiqullah
Drs. H. Busyrol Karim

KETUA PENYUNTING

Drs. H. Ahmad Supardi

STAF PENYUNTING

DR. Ahmad Tafsir
Drs. Cik Hasan Bisri, MS.
DR. Juhaya S. Pradja
Drs. R. Abuy Shadikin
Drs. H. Achjarnis
Drs. Wardi Bachtar, MS.

SEKRETARIS PENYUNTING

Drs. A. Darun Setiady

STAF TATA USAHA

Drs. A. Rusdiana
Drs. Wardija
Fakhri Hadiyahudin, BA.

ALAMAT REDAKSI/TU :

Jl. Raya Cipadung 105
Telp. 790525 Bandung

TERBIT BERDASARKAN :

SK. Menpen RI.
Nomor : 1646/SK.DITJEN
PPG/STT/1990
Tanggal : 1 Mei 1990

PERCETAKAN:

CV. CIBADAK
Bandung

NOMOR : 41 - 42/XIII/1992

DAFTAR ISI :

Halaman

Dari Redaksi	
Editorial	
1. Rasionalitas Dalam Pemahaman Hadits dan kaitannya Dengan Problematika Sosial	1
Drs. H. Ayat Dimiyathi	
2. Metode Pelajar di Perguruan Tinggi	5
Drs. Djodjo Sukardjo Sudana.	
3. Pendidikan Anak Dalam Keluarga Muslim Menyongsong Era Global	12
DR. H. Baehaqi, AK.	
4. Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Agama	18
Drs. Didi Munadi	
5. Sebuah Kajian Psikologis Mengenai Bahasa dan Permasalahannya Bagi Mahasiswa Asing di Australia	26
Drs. Muhibbin Syah	
6. Al-Siyasat Al-Syar'iyat Aw Nidhom Al-Dawlat	30
Drs. I Nurol Aen	
7. Politik Pemikiran Syi'ah	36
Drs. Karsidi Diningrat	
8. Pemikiran Politik Ali Abd. Al-Rozik	45
Drs. Nurrohmah	
9. Gereja Kristen Scentifisme dan Existensinya di Bandung	54
Dra. Ade Maemunah	

PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AL-RAZIQ

Oleh : Drs. Nurrohman, MA

I. Pendahuluan

Penghapusan sistem Khilafah oleh Mustafa Kamal di tahun 1924 menimbulkan kehebohan di dunia Islam karena sistem khilafah dianggap sebagai ajaran dasar dan oleh karena itu penghapusannya bertentangan dengan Islam.¹

Rasyid Rida, murid terdekat Muhammad Abduh, melalui tulisan-tulisannya yang kemudian dibukukan dalam "*Al-Khifah aw Al-Imamah Al-Udhma*" memberikan kritiknya atas keputusan Mustafa Kamal dengan cara mengemukakan argumentasi guna mempertahankan sistem Khilafah.² Rida menerima kenyataan dibubarkannya sistem khilafah oleh Mustafa Kamal, tetapi hal itu dianggapnya sebagai pemecahan sementara. Untuk selanjutnya ia mengusulkan kepada penguasa militer Turki agar masalah pemerintahan di Turki setelah diadakan al-shulh (perdamaian), diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih secara bebas. Pemerintah yang akan dibentuk nanti akan menyusun suatu panitia yang bertugas mempelajari masalah khilafah. Panitia ini juga bertugas mempersiapkan suatu muktamar dunia Islam yang akan membicarakan masalah khilafah setelah satu tahun atau lebih.³

Pada masa itu kondisi dunia Islam pada umumnya masih dibelenggu oleh penjajahan Barat. Turki pada saat itu disamping menjadi tempat kedudukan khilafah Islam juga memiliki militer yang cukup kuat bila dibandingkan dengan kekuatan militer negeri Islam lainnya. Oleh karena itu peranan Turki untuk memimpin dunia Islam melalui ide Pan Islam kelihatannya masih diharapkan oleh beberapa pemimpin Muslim.

Latar belakang ini menjadikan keinginan untuk mendirikan kembali sistem khilafah yang pada waktu itu sudah dibubarkan--sebagai tercermin dalam tulisan-tulisan Rasyid Rida--dapat dipahami sebagai strategi politik untuk bersama-sama mengusir penjajah.

Dalam kondisi semacam ini munculnya pendapat Ali Abd Al-Raziq yang memberikan pembenaran atau tidak menyalahkan tindakan Mustafa Kamal tidak saja menimbulkan kontroversi tapi juga membuat pelontarnya tertuduh sebagai agen kepentingan imperialis dan kolonialis,⁴ serta tertuduh sebagai orang yang mengembangkan pemikiran "sekuler".

Makalah ini akan berusaha menuangkan ide-idenya tentang khilafah untuk dikaji ulang guna melihat kekuatan kelemahan argumentasi yang ia kemukakan, pembaharuan yang ia ajukan serta bagaimana yang ia gunakan dalam memberi jawaban terhadap masalah yang dihadapi umat Islam.

II. RIWAYAT HIDUP

Ali Abd Al-Raziq dilahirkan disebuah pedalaman propinsi Al-Mania pada tahun 1888. Ayahnya Hasan Abd Al-Raziq adalah seorang pasha besar yang berpengaruh dan mempunyai tanah luas. Ayahnya aktif dalam kegiatan politik dan menjadi wakil ketua *Hizb Al-Ummah* (Partai Rakyat) tahun 1907. Partai ini mempunyai hubungan intim dengan penjajah Inggris dan dibentuk sebagai tandingan *Hizb Al-Wathani* (Partai Kebangsaan). Hasan Abd-Raziq adalah sahabat Muhammad Abduh.⁵

Ali adalah pengikut Muhammad Abduh di Al-Azhar. Ia masuk Al-Azhar dalam usia dini sehingga berstatus sebagai mahasiswa persiapan. Dalam pada itu ia belajar ilmu hukum pada Syekh Ahmad Abu Khatwah, sahabat Muhammad Abduh dan sama-sama menjadi murid Jamaluddin Al-Afghani.⁶ Charles Adams dalam bukunya *Islam and Modernism in Egypt* menyebutkan bahwa Ali Abd Al-Raziq berhasil memperoleh ijazah "*Al-Alimiyyah*" pada tahun 1911. Dosen yang menarik perhatiannya adalah Prof. Nallino guru sastra Arab dan Prof. Santilana, guru sejarah Filsafat. Akan tetapi Adams tidak menjelaskan di mana Ali Abd Al-Raziq menerima pelajaran dari kedua guru besar ini

apakah di Al-Azhar atau di tempat lain. Adams hanya menyebutkan bahwa setamat dari AL-Azhar, Ali mengajar disitu pada tahun 1912 dalam mata kuliah Retorika.

Pada pertengahan kedua tahun 1912 ia berangkat ke Inggris belajar bahasa Inggris di London. Kemudian kuliah di Oxford University dalam ilmu ekonomi dan politik sampai pecahnya perang dunia I tahun 1914. Sekembalinya ke Mesir pada tahun 1915, ia diangkat sebagai hakim Pengadilan Syar'iyah di Iskandaria, sambil mengajar disalah satu cabang Al-Azhar dikota itu dalam mata kuliah Sejarah Islam dan sastra Arab.⁸

Dalam pada itu ia mengadakan penelitian mengenai Sejarah Peradilan Islam. Pada tahun 1925 ia menerbitkan bukunya sebagai pendahuluan dari hasil penelitiannya itu dengan judul *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm Bahtsun fi Al-Khilafah wa Al-Hukumah fi Al-Islam* yang menggemparkan Mesir dan dunia Islam pada umumnya. Ia kemudian dikucilkan oleh ulama Azhar. Dalam suatu sidang yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1925 ia secara resmi dikeluarkan dari jajaran ulama. Oleh Rasyid Rida ia dianggap telah murtad dari Islam.⁹ Beliau wafat tahun 1966.

III. IDENYA TENTANG DASAR DASAR PEMERINTAHAN

Pemikiran Ali Abd Al-Raziq kelihatannya dilatar belakangi oleh ; masuknya paham nasionalisme kedunia Islam, ketidak - puasanya terhadap pendapat ulama yang berkembang pada masa itu, penelitiannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, analisa sosio-historis terhadap prilaku dan proses ditegakkannya khilafah dikalangan umat Islam sepanjang sejarahnya dan juga kesimpulan dia terhadap pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi di Madinah.

Sebagaimana diketahui ide nasionalisme di Mesir pada waktu itu telah diperjuangkan oleh para pengikut Muhammad Abduh (w.1905), seperti Mustafa Kamil (1874-1908), Sa'ad Zaghlul (1860 - 1927), Ahmad Lutfi Al-Sayyid (1872-1963) dan lain-lain. Tumbuhnya kesadaran nasional di dunia Islam, menjadikan para tokoh pemikir Islam merasa perlu mengadakan kajian ulang mengenai hubungan agama dan negara atau agama dan politik dengan tetap berpijak padalandsan teologi karena rumusan tradisional sebagai tercermin dalam konsep khilafah dinilai sudah tidak memadai

karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemudian pada saat Ali berusaha mencari landasan teologis konsep khilafah tradisional dari beberapa ulama, ternyata ia tidak mendapatkan seorangpun dari mereka yang menjadikan ayat Al-Qur'an atau Hadits Nabi sebagai dasar hukum adanya khilafah.

Pendapat yang berkembang di kalangan ulama pada masa itu adalah pendapat yang bersumber dari Sa'ad Al-Din Al-Taftazani yang menyebutkan bahwa khilafah adalah kepemimpinan umum dalam masalah agama dan dunia Islam sebagai pengganti fungsi Nabi (*riyasat al-'ammat fi al-din wa al-dunya khilafatan 'ani Al-Nabi*)¹⁰. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa hukum mendirikan khilafat adalah wajib, sehingga jika kaum Muslimin meninggalkannya, maka semuanya berdosa.

Ibn Khaldun berpendapat bahwa kewajiban ini berdasarkan ijma. Selanjutnya ia mengatakan bahwa hanya sebagian kecil saja orang yang tidak menganggap wajib mendirikan khilafah baik berdasarkan akal maupun syara' seperti Al-Asham dari Mu'tazilah dan sebagian Khawarij. Menurut mereka, yang wajib adalah melaksanakan hukum syara'. Jika umat telah mampu berbuat adil dan melaksanakan hukum Allah maka Imam tidak dibutuhkan.¹¹

Bagi mereka yang mewajibkan adanya khilafah, ada dua alasan yang dikemukakan. Pertama, adanya ijma sahabat dan tabiin. Kedua, adanya beberapa hal yang tergantung kepada wujudnya imamah seperti syi'ar keagamaan serta enam prinsip yang harus dilestarikan dalam syari'at yakni ; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.¹²

Jadi menurut Ali Abd Al-Raziq, mereka yang menganggap bahwa mendirikan imamah adalah wajib, tidak ada yang menunjukan dalil atas kewajibannya itu dari Al-Qur'an atau Hadits.

Ada dua ayat yang menyebutkan kata *Uli Al-Amr* dan diduga akan memperjelas pembahasan yang berkaitan dengan persoalan ini, yakni ayat 59 dan 83 dalam surat Al-Nisa.

Ayat pertama berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Ayat kedua berbunyi :

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اِذْعَبُوا بِهِ
وَلَوْ رَدُّهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُولَى الْاَمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلَّه الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ

Ali Abd Al-Raziq mengakui bahwa ada diantara mufasssir yang menafsirkan *Uli Al-Amr* pada ayat pertama sebagai penguasa kaum muslimin pada masa Rasul dan pada masa sesudah Rasul termasuk para khalifah, para qadli dan panglima perang. Ada juga orang yang menafsirkan dengan ulama syara'. Sedang *Uli Al-Amr* pada ayat kedua ditafsiri dengan sahabat senior atau para pemimpin mereka.¹³ Akan tetapi menurutnya, tidak ada seorangpun yang menganggap kedua ayat diatas itu sebagai dalil wajibnya mendirikan khalifah.

Jadi, menurutnya, kedua ayat itu masih belum memadai sebagai dalil adanya khilafah dalam kontek pembicaraan ini. Kandungan maksimal yang dapat diperas dari kedua ayat tadi barangkali adalah bahwa kedua ayat ini membuktikan adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Makna ini jelas lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan makna yang mereka sebutkan. Malahan pengertian seperti itu berbeda jauh satu sama lain.¹⁴

Sebagaimana al-Qur'an, al-Sunnah juga tidak membicarakan khilafah ini. Seandainya ada hadits yang bisa dijadikan dalil, niscaya mereka mendahulukan hadits atas ijma, dan tentu pengarang *Al-Mawaqif* tidak mengatakan bahwa ijma dalam mendirikan khilafah ini tidak memiliki sandaran dalil naqli.¹⁵

Rasyid Rida lah diantara ulama yang berusaha mendapatkan al-Sunnah sebagai dalil atas kewajiban mendirikan khilafah. Dia kritik al-Taftazani dan orang-orang lain semisalnya yang dianggapnya telah lupa mengambil hadits-hadits sahih yang menetapkan adanya jamaah kaum muslimin dan Imam mereka. Sementara hadits lain menyatakan orang mati yang belum melakukan bai'at maka kematiannya bagaikan kematian orang jahiliyah. Ada lagi hadits Hudzaifah yang menyatakan " tetaplah kau dalam Jama'ah kaum muslimin dan Imam mereka."¹⁶

Menurut Ali Abd Al-Raziq, para ulama tidak menjadikan hadits-hadits itu sebagai dalil dalam masalah ini. Sungguhpun demikian ia mengakui bahwa Rasyid Rida bukan orang yang pertama kali mengemukakan argumentasi

semacam itu. Sebelumnya Ibn Hazm Al-Dhahiri juga mempunyai dugaan bahwa ayat 59 surat Al-Nisa dan beberapa hadits sahih yang menyatakan perlunya taat kepada Imam bisa dijadikan dasar kewajiban mendirikan imamat.

Menurut Abd Al-Raziq, bila dilakukan penelitian terhadap hadits-hadits yang disebutkan diatas, semuanya tidak ada yang memadai untuk dijadikan dalil terhadap anggapan mereka itu, yakni bahwa syari'at mengakui adanya khilafah atau *Imamat Al-Udhma* dalam pengertian *mengantikan Nabi dan menduduki kedudukannya di kalangan kaum muslimin*,¹⁷ apalagi untuk dijadikan dalil bahwa khilafah adalah *aqidah syar'iyah* dan salah satu diantara hukum-hukum agama.¹⁸

Isa bin Maryam AS, pernah menyinggung pemerintahan kekaisaran, dan pemerintahan apa yang menjadi hak kaisar diberikan terhadap kaisar. Kendatipun demikian, pernyataan Yesus ini bukanlah merupakan pengakuan bahwa pemerintahan kekaisaran itu merupakan bagian dari syari'at Tuhan dan tidak bisa pula dikatakan bahwa kekaisaran merupakan ciri agama Masehi.

Semua hadits Rasulullah SAW yang menuturkan tentang imamah, khilafah, bai'at dan istilah-istilah sejenis itu tidak menunjukkan suatu pengertian lebih banyak ketimbang yang masih ada dalam ucapan Yesus ketika menyinggung berbagai hukum yang berkenaan dengan pemerintahan kekaisaran.¹⁹

Andaikata benar bahwa Nabi memerintahkan kita untuk mentaati Imam yang telah kita bai'at. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk memenuhi janji yang telah kita buat dengan orang musyrik. Kita pegang teguh janji itu selagi ia juga memegang teguh janjinya kepada kita. Maka itu semua tidak berarti Allah ta'ala ridla terhadap syirik dan mengakui kesyirikan mereka.²⁰ Jika Nabi menyebut bai'at, hukum dan pemerintahan dan membicarakan pula ketaatan kepada umara dan mensyariatkan beberapa hukum dalam masalah ini, maka pemahaman harus dikaitkan dengan kontek pembicaraan di atas.

Dengan demikian, dakwaan tentang adanya wajib syar'i adalah dakwaan besar padahal semua hadits termasuk yang sahih tidak ada yang memadai sebagai penopang terhadap dakwaan itu.²¹

Setelah Ali Abd Al-Raziq berusaha mematahkan argumentasi para ulama yang menganggap pembentukan khilafah adalah wajib

syar'i, lalu ia meninjau khilafah dari sudut sosiologi historis.

Menurutnya, kekhilafahan selalu hanya merupakan bencana bagi Islam dan umatnya, ia selalu melahirkan kebutuhan dan kebobrokan. Semenjak pertengahan abad ketiga hijriyah, kekhilafahan Islam mulai kehilangan pengaruhnya dan kekuasaannya terbatas tidak lebih pada satu wilayah yang sempit terletak di Baghdad dan sekitarnya. Pada masa itu kondisi agama dan syariaat keagamaan di Baghdad sebagai tempat khilafah tidak lebih baik bila dibandingkan dengan negeri-negeri lain yang telah lepas dari kekhilafahan. Demikian juga kondisi ekonomi rakyat.²²

Kiranya Allah SWT yang menjamin kelestarian agama-Nya tidak menghendaki ketinggian atau kehinaan agama-Nya tergantung pada satu bentuk pemerintahan atau kepemimpinan. Allah juga tidak menghendaki kebaikan atau kerusakan hamba-Nya yang muslim tergantung kepada khilafah atau para khalifah.²³

Akhirnya Ali Abd Al-Raziq sampai pada kesimpulan bahwa apa yang mereka namakan khilafah atau imamah al-Udhma sebenarnya bukanlah merupakan sistem yang ditegakkan atas asas ajaran agama yang benar dan akal yang sehat.²⁴

Sebelum mengkaji kepemimpinan Rasulullah Ali Abd Al-Raziq antara lain mengatakan bahwa *risalah* bukan *mulk* keduanya tidak memiliki keterkaitan. Risalah adalah satu kedudukan dan *mulk* kedudukan yang lainnya. Banyak diantara malik yang bukan Nabi atau Rasul dan banyak Rasul yang bukan malik bahkan kebanyakan Rasul bertugas semata-mata sebagai rasul. Dalam sejarah rasul sedikit sekali orang yang menggabungkan kedua kedudukan itu. Kemudian ia melontarkan pertanyaan itu menggabungkan antara risalah dan *mulk*?²⁵

Ali Abd Al-Raziq mengakui bahwa Nabi melakukan tindakan yang bisa dinilai sebagai pengaturan politik dalam menjalankan pemerintahannya, seperti jihad. Jika jihad (perjuangan dengan senjata) di samping sebagai alat dakwah juga diartikan sebagai cara untuk mengokohkan negara dan memperluas kerajaan, cepatah orang mengambil kesimpulan bahwa Muhammad disamping sebagai Rasulullah juga sebagai penguasa politik.

Akan tetapi walaupun kesimpulan diatas mau diterima terdapat satu pertanyaan yakni, apakah pembentukan pemerintah Islam dan

berkecimpungnya Nabi didalamnya merupakan bagian tugas yang diperintahkan dan diwahyukan Allah atau diluar tugas beliau sebagai pembawa risalah?

Menurut Ali Abd Al-Raziq, perilaku politik yang dilakukan Nabi adalah diluar tugasnya sebagai pembawa risalah. Kalau memang ternyata Nabi menjadi pemimpin politik, maka hal itu timbul karena fenomena kebutuhan duniawi yang tidak ada sangkut pautnya dengan risalah (*kharijan 'an wadhifat al-risalat wa anna mulkahu alladzi syayyadahu hwa min qabili dzalika al-amal al-dunyawi alladzi la'alaqatq bi al-risalat*).²⁶

Memang benar, lanjutnya memberi penjelasan, tugas risalah itu menuntut Nabi untuk memiliki semacam kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya, tetapi kepemimpinan dan kekuasaan itu tidak sama dengan kepemimpinan dan kekuasaan seorang raja atas rakyatnya.²⁷

Menurutnya, kekuasaan Rasul atas bangsanya adalah kekuasaan rohani yang timbul dari keimanan dan ketundukan yang sempurna yang selanjutnya diikuti dengan ketundukkan fisik. Sedangkan kekuasaan pemimpin politik adalah kekuasaan fisik yang berdasar atas ketundukan fisik tanpa ada kaitan dengan hati. Yang pertama kekuasaan memimpin dan menunjukan jalan jalan kepada Allah sedang yang kedua kekuasaan dalam mengatur kemakmuran dan kebaikan kehidupan Duniawi, Yang pertama untuk agama, yang kedua untuk dunia. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk manusia. Yang pertama kepemimpinan agama, yang kedua kepemimpinan politik. Amat jauh perbedaan agama dan politik.²⁸

Sungguhpun demikian, Ali Abd Al-Raziq memandang logis bila semua umat manusia didunia ini memeluk satu agama dan diatur oleh satu ikatan keagamaan. Sedangkan bila umat manusia dimuka bumi ini diatur melalui ikatan politik dibawah satu pemerintahan, maka hal itu dengan segera akan membuat mereka keluar dari watak kemanusiaannya, dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.²⁹

Pengaturan umat manusia melalui pemerintahan dan ikatan politik merupakan satu kebutuhan duniawi yang dipasrahkan Allah SWT kepada kemampuan akal manusia. Manusia diberi kebebasan untuk mengaturnya melalui bimbingan dan pertimbangan akal, ilmu pengetahuan, interest, dorongan nafsu dan ambisi-ambisi mereka. Hikmah yang diberikan

Allah SWT dalam hal ini jelas, yakni agar manusia menjadi bangsa yang beraneka.³⁰

IV. ANALISA PERBANDINGAN

Sumbangan Ali Abd Al-Raziq dalam pemikiran politik Islam pada saat memasuki periode modern akan nampak jelas bila diadakan analisa perbandingan dengan pendapat yang berkembang di dunia Islam pada masa itu baik yang dikemukakan semisal Rasyid Rida yang bukunya terbit sebelum Ali Abd Al-Raziq menerbitkan bukunya maupun yang dikemukakan oleh Diya Al-Din Al-Rais yang menerbitkan bukunya sebagai kritik terhadap pendapat Ali Abd Al-Raziq. Untuk mudahnya kita ambil perbandingan antara Rasyid Rida dengan Ali Abd Al-Raziq.

Sebenarnya baik Rasyid Rida maupun Ali Abd Al-Raziq sama-sama mengakui kenyataan bahwa Nabi Muhammad di samping pemimpin agama juga memiliki peran politik. Perbedaan timbul pada saat mereka mempersoalkan lebih lanjut apakah peran politik yang dibawa Nabi bagian dan kelanjutan dari tugas risalahnya atau bukan.

Nampaknya, Rasyid Rida memandang peran politik yang dibawa Nabi merupakan bagian dan kelanjutan dari tugas risalahnya, sedangkan Ali Abd Al-Raziq menganggapnya bukan bagian dari tugas risalah tapi timbul karena tuntutan kebutuhan. Dengan kata lain bagi Rasyid Rida peran politik yang dibawa Nabi timbul atas bimbingan wahyu sedangkan Ali Abd Al-Raziq memandang peran politik Nabi timbul atas pertimbangan akal. Dengan demikian walaupun ada wahyu sifatnya hanya konfirmasi.

Perbedaan lain nampak dalam penggunaan istilah. Bagi Rasyid Rida khilafah adalah pelanjut fungsi Nabi sebagai pemimpin agama di dunia. Sedangkan Ali Abd Al-Raziq menganggap khilafah itu pelanjut Nabi sebagai pemimpin dunia. Ali Abd Al-Raziq tidak membedakan antara khilafah dan mulk karena menurut beliau yang bisa dilanjutkan dari Nabi adalah kepemimpinan dunia bukan kepemimpinan agama. Kepemimpinan agama tidak bisa dilanjutkan.³¹

Bagi Ali Abd Al-Raziq, Abu Bakar tidak lebih dari pemimpin dunia tidak punya otoritas dalam hal agama. Abu Bakar menurutnya, adalah raja pertama dalam sejarah Islam. Pembaiatan terhadap Abu Bakar adalah pem-

baiatan politik yang memakai atribut-atribut negara modern. Negaranya merupakan negara Arab dengan pemerintahan Arab pula.³²

Perang yang dilakukan Abu Bakar pada masa awal pemerintahannya yang kemudian dikenal dengan perang *riddah* juga bukanlah perang agama melainkan perang politik dalam arti yang sesungguhnya.³³ Perang itu dilakukan sebagai upaya mempertahankan kesatuan Arab dan melindungi negara mereka dari ancaman.

Dalam memandang ikatan agama berdasar adanya kesatuan dalam tauhid, nampaknya juga terdapat perbedaan antar Rasyid Rida dengan Ali Abd Al-Raziq. Bagi Rasyid Rida ikatan agama mesti dibarengi dengan kesatuan ikatan politik. Sedangkan Ali Abd Al-Raziq sungguhpun ia memandang ikatan agama sebagai sesuatu yang logis namun ikatan itu tidak mesti menimbulkan keharusan bernaung dalam satu ikatan politik. Ikatan politik - katanya - bisa diusahakan berdasarkan pertimbangan akal dan kemaslahatan. Upaya mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan politik tidak sejalan dengan faham kebinekaan. Kebinekaan yang bisa menimbulkan dinamika itu, menurutnya, memang dikehendaki Tuhan.³⁴

Kalau dianalisa lebih jauh, pendapat kedua tokoh ini dilatar belakangi oleh titik tolak yang berbeda. Yang pertama titik tolaknya cita ideal berdasarkan faham khilafah tradisional. Paham inilah yang mewarnai pemikiran politik Islam pada masa klasik dan pertengahan. Didalamnya nampak pengaruh pemikiran Yunani seperti Aristoteles yang memandang politik sebagai wisdom. Yang kedua bertitik tolak dari realitas obyektif umat Islam yang telah menerima paham nasionalisme barat. Oleh karena itu ia mengambil referensi pemikiran politik modern, politik dipandang bukan sebagai *wisdom* melainkan dipandang sebagai *science* yang empiris, rasional dan kalkulatif. Politik juga merupakan kekuatan *oppressive*. Jadi politik identik dengan *power* bahkan dengan *naked Power*.³⁵ Oleh karena itu bisa dipahami bila ia berusaha memisahkan agama dengan politik.

V. PENUTUP

Menurut penulis ada dua tesis yang dikemukakan oleh Ali Abd Al-Raziq yang bisa dijadikan kunci untuk memahami pemikiran politiknya. Tesis pertama mengatakan bahwa peran politik yang dilakukan oleh nabi di Madinah bukan bagian dari risalahnya. Peran ini

dilakukan berdasarkan pertimbangan akal dan kebutuhan bukan berdasarkan suruhan langsung dari wahyu.

Sungguhpun pengembangan dari tesis ini belum bisa memuaskan semua pihak - seperti dalam kasus jihad, apakah tugas agama atau tugas politik - namun tesis ini menurut penulis bisa dipandang sebagai tesis pertama yang dicetuskan oleh pemikir Islam modern.

Tesis kedua adalah pernyataannya - secara implisit - bahwa negara didirikan atas dasar perjanjian atau kontrak sosial. Pemikiran tentang kontrak sosial memang telah ada - secara implisit - pada pemikiran Al-Mawardi. Akan tetapi Ali Abd Al- Raziq nampak lebih jelas dengan mengatakan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji (kesepakatan) sungguhpun janji itu dilakukan terhadap orang musyrik selagi orang musyrik itu juga melakukan hal yang sama.

Tesis ini bisa menjadikan ia berbeda dengan ulama lain yang masih memperthankan agar kepala Negara Seorang muslim. Sebab paham yang menyatakan bahwa perjanjian adalah dasar berdirinya suatu negara membawa konsekwensi bahwa setiap warga negara hanya akan terikat pada isi perjanjian itu (konstitusi). Oleh karena itu bila dalam konstitusi tidak disebutkan bahwa Kepala Negara harus seorang muslim, maka kaum muslimin yang ada pada negara itu harus mentaati konstitusi dan patuh kepada penguasa sungguhpun penguasa itu non muslim.

Jadi, sebagaimana Abduh,³⁶ Ali juga memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh warga negara baik muslim maupun non muslim. Dengan demikian, pembagian warga negara secara tradisional menjadi muslim dhimi tidak relevan lagi.

Menurut penulis, pemikiran Ali Abd Al-raziq yang secara "radikal" memisahkan agama dari negara (politik) hanya bisa dipahami bila politik dikaji secara *science*. Akan tetapi bila politik dikaji dari aspek perilaku maka betapapun "sekuler"-nya sebuah negara, masyarakatnya tidak akan bisa melepaskan diri dari tuntutan etis.

Untuk itu pada tingkat ini - menurut penulis - hubungan antara agama dan negara sebenarnya tidak bisa dipisahkan bahkan sejarah seringkali menunjukkan bahwa hubungan agama dengan politik saling menguatkan. Politik semakin kuat lewat dukungan agama dan agama mudah berkembang lewat dukungan politik.

Terlepas dari adanya kontroversi terhadap pemikiran politiknya, menurut penulis Ali Abd al-Raziq telah berjasa dalam menyelesaikan hubungan agama dan politik atau agama dan negara yang dihadapi dunia Islam pada umumnya saat mereka memasuki periode modern.

DAFTAR BACAAN

1. Harun Nasution, **Pembaharuan Dalam Islam**, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm.34.
2. Rasyid Rida, **Al-Khilafah aw Al-Imamah Al-Udhma**, Mesir, Maktabah Al-Manar, 1924.
3. *Ibid.*, hlm.141-142.
4. Lihat, Dhiya Al-Din Al-Ra'is, **Al-Islam wa Al-Khilafah fi Al- Ashri Al-Hadits**, Maktabat Dar Al-Turats, Kairo, 1976, terutama pada bab **Man Hwa Al-Muallif**, hlm.203-224.
5. *Ibid.*, hlm.57. juga Charles Adams, **Islam dan Modernism in Egypt**, London, Oxford University Press, 1933, hlm.260.
6. Charles Adams, **Islam and Modernism in Egypt**, hlm.260.
7. *Ibid.*
8. *Ibid*
9. Dhiya Al-Din Al-Rais, **Al-Islam wa Al- khilafah**, hlm.135.
10. Ali Abd Al-Raziq, **Al-Islam wa Ushul Al-hukm**, Mathba'ah Mesir, 1925, hlm.11.
11. *Ibid.*, hlm.12.
12. *Ibid.*, halaman 12-13
13. *Ibid.*, hlm.14-15.
14. *Ibid.*, hlm.15. Uli al-Amr telah ada pada masa Rasul bisa dipahami dari kedua ayat itu. Oleh karenanya Uli al-Amr bukanlah khilafah dalam pengertian mereka yakni kepemimpinan umum dalam masalah agama dan dunia sebagai pengganti fungsi Nabi. Disamping itu Uli Al-Amr adalah jamak, oleh karenanya tidak cocok bila di artikan khilafah dalam konsep tradisional yakni kewajiban kaum muslimin memiliki satu Imam dan tergabung dalam satu ikatan politik. (penulis.)
15. *Ibid.*, hlm.16.

16. Rasyid Rida, *op.cit.*, hlm.11.
17. Ali Abd Al-Raziq, *op.cit.*, hlm.17.
18. *Ibid.*, hlm.18.
19. *Ibid.*, hlm.18-19.
20. *Ibid.*
21. *Ibid.*, hlm.21.
22. *Ibid.*, hlm.36-37. Pada masa itu meskipun secara *de facto* dinasti-dinasti kecil memiliki otonomi untuk mengatur pemerintahan sendiri akan tetapi secara *de jure* khalifahan di Baghdad masih diakui paling tidak untuk memberikan legitimasi terhadap dinasti-dinasti itu. (penulis)
23. *Ibid.*, hlm.38.
24. *Ibid.*
25. *Ibid.*, hlm.49-50.
26. *Ibid.*, hlm.55. dengan istilah lain Nurchalish Majid menyatakan bahwa Nabi terpilihnya sebagai pemimpin di Madinah terjadi karena proses demokratis. lihat. "Cita-cita Politik Kita" dalam **Aspirasi Umat Islam Indonesia**, Jakarta, Leppenas, 1983, hlm.12. Sungguhpun Nabi terpilih melalui proses demokratis, risalah yang dibawanya memberikan pedoman etis yang perlu dijadikan acuan bagi pemegang kekuasaan politik. Oleh karena itu menurut penulis ada keterkaitan antara risalah dan politik meskipun tidak secara langsung. (penulis)
27. *Ibid.*, hlm.65.
28. *Ibid.*, hlm.69.
29. *Ibid.*, hlm.78.
30. *Ibid.*
31. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ibn Khaldun yang membedakan antara khilafah dan mulk. lihat. Muqaddimah hlm, 218- 219. Abu al 'ala al-Maududi senada dengan Ibn Khaldun. Dengan panjang lebar ia menguraikan proses peralihan dari khilafah kepada mulk. lihat **al-Khilafah wa al-Mulk**, Bandung, Mizan, 1988, hlm.136-218.
32. Ali Abd Al-Raziq, *op.cit.*, hlm.92. proses pembelaan Abu Bakar bisa dilihat pada Ibn Qutaibah, **al-Imamah wa al Siyasah, Mesir, Maktabah Al-Halaby**, tt., hlm.12-20.
33. Setidak-tidaknya ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Ali Abd Al-Raziq dalam pendapatnya ini. Pertama, orang yang diperangi Abu Bakar tidak semuanya murad. Kedua, adahadits yang mengatakan : aku perintahkan memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan barang siapa yang bersedia mengucapkan janji itu aku pelihara harta dan jiwanya dengan cara yang benar. Dan urusan mereka selanjutnya terserah kepada Allah. Ketiga, Kesaksian Umar atas keislaman Malik bin Nuwairah pada saat dibunuh Khalid. lihat. *Ibid.*, hlm.153-157.
34. *Ibid.*, hlm.121. pendapat ini didasarkan pada Q.S Hud ayat 118 dan 119 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 251.
35. Analisa ini didasarkan kepada referensi Ali Abd al-Raziq terhadap pemikiran politik Thomas Hobes (1588-1679) yang oleh kalangan ilmuwan dipandang sebagai pembangun pemikiran politik modern. Pemikirannya mengenai kontrak sosial juga juga menunjukkan bahwa ia berusaha merujuk pemikiran modern, sungguhpun dia sendiri ternyata salah paham dalam memahami Hobes. lihat. Munawir Sjadzali, **Islam dan Tata Negara**, Jakarta, UI Prss, 1990, hlm.142.
36. *Ibid.*, hlm.133.

DAFTAR BACAAN

- Ali Abd Al-Raziq, **Islam wa Ushul Al-Hukm**, Matba'ah Mesir, 1925
- Al-Maududi, **Al-Khilafah wa Al-Mulk**, edisi Indonesia, Bandung, Mizan, 1988.
- Charles Adams, **Islam dan Modernism in Egypt**, London, Oxford University Press, 1933.
- Dhiya Al-Din Al-Rais, **Al-Islam wa Al-Khilafah fi Al-Ashri Al-Hadits**, Maktabat Dar Al-Turats, Kairo, 1976.
- Harun Nasution, **Pembaharuan Dalam Islam**, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- Ibn Khaldun, **Muqaddimah**, Bairut, Dar Al-Fikr, tanpa tahun.
- Ibn Qataibah, **Al-Imamah wa Al-Siyasah**, Mesir, Maktabah Al-Halaby, tanpa tahun.
- Munawir Sjadzali, **Islam dan Tata Negara**, Jakarta, UI Press, 1990.

Nurchalis Majid, "Cita-cita Politik Kita" dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta, Leppenas, 1983.

Rasyid Rida, Al-Khilafah aw Al-Imamah Al-Udhma, Mesir, Maktabah Al-Manar, 1924.

LAMPIRAN

Perbandingan antara rasyid rida dan ali abd al-raziq dalam persoalan khilafah

No.	Konsep	Rasyid Rida	Ali Abd Al-Raziq
1.	Khilafah	Kepentingan agama dan dunia	Kepemimpinan dunia
2.	Rasulullah	Pemimpin agama dan politik	Pemimpin agama, sedang pemimpin politik adalah tuntutan keadaan.
		Tugas pemerintahan timbul atas bimbingan wahyu	Tugas pemerintahan diterima atas pertimbangan akal
3.	Al-Mulk dan Khilafah	Al-Mulk berbeda dengan Khilafah. Al-Mulk adalah pemimpin dunia	Keduanya sama sebagai Nabi dalam memimpin dunia.
4.	Hukum Khilafah	Wajib syar'i berdasar hadits dan ijma	Wajib akli berdasar ijma (kesepakatan)
5.	Ikatan keagamaan	Harus dibarengi dengan ikatan politik	Sesuatu yang logis tapi tidak harus dibarengi ikatan politik.
6.	Kesatuan Politik	Konsekwensi logis dari kesatuan tauhid	Tidak sejalan dengan paham pluralisme yang sudah menjadi sunnat Allah yang akan melahirkan dinamika.

CATATAN KAKI

1. **Dhunal Islam Juz 3**, Dr. Ahmad Amin, halaman : 235;
2. **Ushul Syi'ah wa ushuluha**, Muhammad Husaen Ala Kasyif Al Ghita, halaman : 102-109; **Al Fashal fi Al-Milal wa al-Ahwa'u wa An- Nihal**, Ibn Hazm, juz.4, halaman : 181; **Al Milal wa an-Nihal** Juz. 1, Asy Syahrastani, halaman : 169; **At Tabshier fi Adzdzin**, Li Asfaraayyaeni, halaman : 23 ; **Al Farq baenal firaq**, Al Baghdadie, halaman : 40; **'Aqidah Asy Syi'ah**, Benar Lewis, Halaman : 227; **Al Mahdiah fi Al Islam**, Sa'ied Muhammad Hasan, Halaman : 130.
3. **Al Fashal fi Al Milal wa Al-Ahwa'u wa An-Nihal Juz 4**, Ibnu Hazm halaman : 180; **Al Milal wa An-Nihal 'Ala Al Fashal**, Ibnu Hazm, Juz. 2 halaman : 38-39; **Al Khawarij wa Asy Syi'ah**, Halaman : 245- 250; **'Aqidah Asy Syi'ah Ronaldsan**, halaman 231 **Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah**, Goldziher halaman : 205; **Al-Mahdie wa Al Mahdiyyah**, Dr. Ahmad Amin, halaman : 6; **Dhuhul Islam Juz 3**, Dr. Ahmad Amin, halaman : 237;
4. **Dhuhul Islam Juz 3**, Dr. Ahmad Amin, halaman : 236.
5. **Harakat Ays Syi'ah al Mutatharafiin**, Dr. Muhammad Jabier 'Abd 'Ali, halaman :16.
6. **Ushulul Isma'iliyah**, Benar Lewis, halaman : 8;
7. **Dhuhul Islam Juz 3**, Dr. Ahmad amin, halaman : 241 **Al Mahdie wa Al Mahdiyyah**, Dr. Ahmad Amin, halaman : 12; **Al Mahdiyyah fi Al Islam**, Sa'edie Muhammad Hasan, halaman : 49.
8. **'Aqidah asy-Syi'ah**, Ronaldsan, halamam :231;
9. **At Taj fi Ushul al Hadits**, Juz 5, MAnsyur 'Alie Nashif, hal : 310 ; **Al Bayanat**, Abu Ala Al MAududi, Halaman : 114; **Shaheh Bukhari**, **Shaheh Muslim**;
10. **Al Bayanat**, Abu Ala Al Maududi, halaman : 115;
11. **Al Bayanat**, Abu Ala Al Maududi, halaman 115-116;
12. **Muqadimah Ibnu Khaldun**, halaman : 312-321; **Sunan Ibnu Majah Juz 2**, halaman :269-270;
13. **Da'irah Ma'arif al Qarni Ar Rabi' 'asyar**, Al Asyrien, Juz. 10, halaman : 48;
14. **Lihat dalam kitab Al Bahaiyah Tariha wa 'Aqidahtuha**, 'Abdur Rahman wa Kiel, halaman : 66;
15. **Dhuhul Islam Juz 3**, Dr. Ahmad Amin : 244.
16. (Penj) Nama lengkapnya bernama **Ahmad Zainuddin Al Ansai** (1157-1242 H/1743-1826 M) dia seorang tokoh di Irak yang mengembangkan ajaran baru yang dikenal dengan aliran **Shaikiyah**, **Shaikiyah** adalah cabang dari **agama Bab** dan **Bahai**, agama Bab dab Bahai cetusan dan lahir dari Syi'ah Isma'iliyah. Kemudian disusul oleh da'i yang terkemuka, yaitu bernama **Kazhim Al Rashti** (1209- 1259 H/1794-1843 M).